

IMPLEMENTASI PILAR PENDIDIKAN DALAM KEBIJAKAN BANGGA MBANGUN DESA DI KABUPATEN CILACAP

THE EDUCATION PILLAR IMPLEMENTATION OF BANGGA MBANGUN DESA POLICY IN CILACAP

Oleh:

Nanda Septianingsih (12110241033), Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Prodi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, nandaseptiana22@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) implementasi Pilar Pendidikan dalam Kebijakan Bangga Mbangun Desa di Kabupaten Cilacap, (2) faktor-faktor pendukung, (3) faktor-faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di 4 lokasi, yaitu: Bapermas PP PA KB, Disdikpora, SMPN1 Cilacap, dan SMAN1 Cilacap. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Tahapan analisis data penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data yang dipakai yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara konsep implementasi pilar pendidikan masuk dalam *structural approach* yang bersifat *top-down* yang berjalan secara demokratis, (2) faktor pendukung implementasi pilar pendidikan yaitu kolaborasi antar agen dan sinergi antar pemangku kepentingan serta sumber daya manusia yang memadai, dan (3) faktor yang menghambat implementasi pilar pendidikan yaitu regulasi pendanaan yang kecil dan komunikasi antar agen yang kurang lancar.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pilar pendidikan, bangga mbangun desa

Abstract

This research has purpose to know: (1) the Education Pillar Implementation of Bangga Mbangun Desa policy in Cilacap, (2) supporting factors, (3) inhibiting factors. This research used a qualitative descriptive approach. This research was done in four locations, namely: Bapermas PP PA KB, Disdikpora, SMPN 1 Cilacap, and SMAN1 Cilacap. Data collection techniques used observation, interview, and document study. This research data analysis stage of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Test the credibility of the data used techniques triangulation and source triangulation. The results showed that: (1) in the concept of the implementation of the education pillars into the structural approach of top-down democratic, (2) factors supporting the implementation of the education pillars of the collaboration between agencies and synergy among stakeholders as well as the human resources are inadequate and (3) the factors inhibiting the implementation of pillars namely education funding regulations were small and communication between agents are substandard.

Keywords: policy implementation, education pillar, bangga mbangun desa

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan. Sejalan dengan pemikiran (H.A.R Tilaar 1992: 77) yang mengemukakan bahwa salah satu aspek terpenting dalam menyiapkan dan merekayasa arah perkembangan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah Pendidikan. Pendidikan berperan sebagai salah satu aspek pembangunan yang sekaligus merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan. Termasuk didalamnya

pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah yang dapat menjadi pemicu berkembangnya pembangunan bidang lainnya, guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga memungkinkan masyarakat Indonesia semakin siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (<http://berita.upi.edu/?p=4161>).

Menyikapi tentang pembangunan daerah, mengingat Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, wilayah seluas itu tentu saja sangat diperlukan membuat sebuah

Kebijakan. Syafaruddin (2008: 76) berpendapat bahwa kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat berupa tujuan-tujuan, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah ke masa depan. Manajemen puncak merupakan salah satu jenjang manajemen yang berkaitan erat dengan kebijakan. Kebijakan ini bersifat sangat umum dan memiliki kekhususan yang rendah. Kebijakan yang dibuat yakni kebijakan percepatan pembangunan melalui terobosan-terobosan agar pencapaian penyelesaian permasalahan di Kabupaten Cilacap sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi lebih cepat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap dibawah Pimpinan Bupati Cilacap membuat sebuah kebijakan Bangga Mbangun Desa. Kebijakan Bangga Mbangun Desa merupakan sebuah kebijakan yang berorientasi menumbuh kembangkan seluruh potensi-potensi yang ada di pedesaan, karena pedesaan adalah sentral pembangunan terkecil yang ada di wilayah. Apabila pembangunan di desa-desa dapat berkembang dengan baik maka secara otomatis pembangunan dalam wilayah kabupaten, propinsi dan Bangsa Indonesia akan maju. Oleh karena itu dibutuhkan konsep yang aplikatif agar terjadi sinergis dengan yang dibutuhkan dalam kebijakan Bangga Mbangun Desa tersebut. Kebijakan Bangga Mbangun Desa yang dibuat sesungguhnya sebagai wujud implementasi tekad Gubernur Jawa Tengah Bali Ndeso Mbangun Deso untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal dalam mewujudkan desa mandiri. kebijakan Bangga Mbangun Desa merupakan optimalisasi wujud peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa tanpa meninggalkan penataan kota dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Kebijakan Bangga Mbangun Desa memiliki 4 pilar yang menopangnya, yakni pilar pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Pilar pendidikan menjadi pilar utama dalam kebijakan tersebut karena salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan daerah tidak terlepas dari

perhitungan statistik, khususnya yang terkait dengan pendidikan di Kabupaten Cilacap. Menurut hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap, pada tahun 2013, besarnya IPM yaitu 71,26% sedangkan Jawa Tengah sebesar 74,04%. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan Susenas pada tahun 2014 IPM Kabupaten Cilacap meningkat menjadi 73,34 masih dibawah IPM Jawa Tengah 74,05. Kabupaten Cilacap berada pada peringkat 21 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan masih di bawah IPM Nasional. Pencapaian hasil IPM merupakan hasil pencapaian jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia, di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain: semakin bertambahnya usia harapan hidup penduduk, meningkatnya angka melek aksara dan rata-rata lama sekolah penduduk pada usia >15 tahun ke atas, dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk (<http://jateng.bps.go.id>).

Berdasarkan observasi awal, terdapat berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Cilacap baik dibidang pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. Permasalahan yang dihadapi yaitu masih banyaknya siswa yang putus sekolah/DO, masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah, masih tingginya angka buta aksara.

Pada tahun 2012 Angka melek aksara di Kabupaten Cilacap (91,49%) diatas angka melek aksara Provinsi Jawa Tengah 90,45%. Tahun 2014, prosentase angka melek aksara Nasional sebesar 91,71%, sedangkan Kabupaten Cilacap sebesar 97,75%. Meskipun angka melek aksara Kabupaten Cilacap lebih tinggi dibanding angka melek aksara Nasional akan tetapi masih ada 2,25 % penduduk yang buta aksara. Masih adanya penduduk yang buta aksara dikarenakan masalah geografis wilayah Kabupaten Cilacap yang kurang terjangkau akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cilacap pada tahun

2012 yaitu 6,87 tahun. Sedangkan menurut data dari Disdikpora Kabupaten Cilacap, Rata-rata lama sekolah di tahun 2014 yaitu baru mencapai 7,10 tahun. Artinya, rata-rata pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VII, yaitu baru menamatkan pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cilacap disebabkan banyak warga yang belum sadar akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya angka kemiskinan penduduk Cilacap yang mengakibatkan anak usia sekolah lebih memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan sekolah yang membutuhkan biaya. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah, Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2014 yaitu sebanyak 1.685.573 jiwa dengan 519.850 kepala keluarga (KK). Angka kemiskinan Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 adalah 15,24%.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah dibawah pimpinan Bupati Cilacap berupaya membuat sebuah alternatif-alternatif pemecahan masalah khususnya di bidang pendidikan yang terjadi di kabupaten Cilacap. Tujuan penelitian ini yaitu Mengetahui tentang Implementasi, faktor pendukung, faktor penghambat Pilar Pendidikan dalam Kebijakan Bangga Mbangun Desa di Kabupaten Cilacap.

Kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008: 75). Definisi lain dijelaskan oleh Anderson dalam Arif Rohman dan Teguh Wiyono (2010: 2) bahwa kebijakan diartikan sebagai suatu arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku kebijakan didalam mengatasi suatu masalah atau urusan- urusan yang bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan dalam bentuk peraturan yang berguna menjawab sebuah permasalahan

yang terjadi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Charles O. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102), komponen- komponen tersebut mencakup lima hal, yakni *goal, plans, program, decision, dan effect*. merupakan beberapa pendekatan dalam kebijakan berdasarkan pendapat Linblom dalam Syafaruddin (2008: 79-80), yaitu: (1) Pendekatan Analisis, merupakan pendekatan yang menggunakan hasil analisis dalam mengambil keputusan dan membuat alternatif-alternatif kebijakan untuk menghasilkan suatu kebijakan, (2) Pendekatan Politik, yaitu pengambilan keputusan untuk membuat suatu kebijakan yang dipengaruhi oleh kekuasaan, tekanan, dan kendali dari pihak lain, (3) Pendekatan Politik, yaitu pengambilan keputusan untuk membuat suatu kebijakan yang dipengaruhi oleh kekuasaan, tekanan, dan kendali dari pihak lain, dan (4) Pendekatan Analisis dan Politik, adalah pendekatan yang menengahi antara pendekatan analisis dan pendekatan politik. Arif Rohman (2012: 86) berpendapat bahwa kebijakan pendidikan adalah keputusan berupa pedoman bertindak yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. sedangkan kebijakan pendidikan menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2012: 140) merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu tindakan strategis dalam rangka mencapai suatu tujuan guna menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan.

Menurut Dwijowijoto (2003) dalam Syafaruddin (2008: 86) implementasi kebijakan merupakan cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sedangkan Putt dan Springer dalam Syafaruddin (2008: 86) memaparkan tentang implementasi kebijakan

yang dipahami sebagai serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud dalam Pratik organisasi. Dalam pelaksanaan implementasi, Syafaruddin (2008: 86) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dilaksanakan langsung berdasarkan kebijakan yang telah dibuat atau dapat pula dilaksanakan dalam bentuk kebijakan *derivate* atau disebut juga dengan kebijakan turunan. Artinya, setelah kebijakan tingkat nasional dibuat, maka kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara langsung atau melalui kebijakan di tingkat daerah atau lokal.

Proses implementasi suatu kebijakan pendidikan berlangsung lebih rumit dan kompleks jika dibandingkan dengan proses perumusannya. Terlihat dari proses implementasinya yang melibatkan berbagai elemen seperti perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif/organisasi. Implementasi kebijakan sebagaimana dikatakan Grindle dalam Sudiyono (2007: 77) sesungguhnya tidak semata-mata terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi lebih terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar sebuah impian, atau rencana yang bagus tersimpan rapi dalam arsip manakala kebijakan tidak diimplementasikan.

Dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan, Charles O. Jones dalam Arif Rohman (2012: 106) mendasarkan diri pada konsepsi aktifitas-aktifitas fungsional, karena implementasi merupakan aktifitas untuk mengoperasikan sebuah program. Tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah: (1) Pengorganisasian merupakan aktifitas pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan, (2) interpretasi merupakan aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan (3) aplikasi

merupakan aktifitas yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Solichin Abdul Wahab (1997) dalam Arif Rohman (2012: 110-115) membagi implementasi kebijakan menjadi empat pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Struktural (*Structural Approach*), pendekatan struktural bersifat *top-down* yang menekankan pentingnya komando dan pengawasan dalam struktur masing-masing organisasi. Artinya, kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural. (2) Pendekatan Prosedural dan Manajerial (*Procedural and Managerial Approach*), pendekatan ini lebih menitikberatkan pada upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang relevan, termasuk prosedur manajerial serta teknik manajemen yang tepat. (3) Pendekatan Perilaku (*Behavioural Approach*), pendekatan ini berasumsi bahwa perilaku manusia beserta segala sikapnya juga dipertimbangkan dalam mempengaruhi upaya implementasi kebijakan agar berjalan baik. (4) Pendekatan Politik (*Political Approach*), pendekatan ini lebih melihat faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan.

Teori tentang implementasi kebijakan pendidikan banyak digagas oleh banyak ahli. Akan tetapi ada tiga teori yang paling menonjol menurut Arif Rohman (2012: 107-110), Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn yang dikelompokkan sebagai pencetus teori *top-down*, yang berpendapat bahwa untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*), maka membutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain: (1) kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius, (2) untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai, (3) perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia, (4) kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan

kausalitas yang handal, (5) hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, (6) hubungan saling ketergantungan harus kecil, (7) adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, (8) tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, (9) adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan (10) pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2007: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Analisis deskriptif yaitu menggambarkan suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian atau fakta-fakta yang terjadi secara alamiah. Jadi penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi, dimana data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk naratif dengan berbagai bentuk penyajian pendukung.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di empat lokasi yang berada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Keempat lokasi tersebut adalah Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap, Disdikpora Kabupaten Cilacap, SMP Negeri 1 Cilacap, dan SMA Negeri 1 Cilacap. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dari tanggal 4 Maret-4 Juni 2016.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu: Kabid dan staff Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Desa Bapermas PP PA KB Kabupaten Cilacap, Kasubag Perencanaan, Kasubag Dikmen, Kabid PAUD dan PNFI Disdikpora Kabupaten

Cilacap, Kepala sekolah SMPN 1 Cilacap, 2 guru pembimbing siswa *leader class* dari SMPN 1 Cilacap dan SMAN 1 Cilacap, 1 staff bagian TU, 1 siswa *leader class*. Selain itu terdapat sumber data tambahan guna melengkapi informasi yang dibutuhkan, yaitu 1 siswa SMK.

Instrumen Penelitian

Instrumen kunci (*key instrument*) pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang dikenal dengan istilah *human instrument*. Hal tersebut dikarenakan peneliti berperan besar dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, penafsiran data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini, menggunakan teknik observasi terus terang atau tersamar, wawancara semiterstruktur, dan studi dokumen.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan selama penelitian berlangsung. Menurut Miles and Hubberman (1984) dalam Sugiyono (2013: 338), Tahapan aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusions: drawing/verifying*).

Uji Kredibilitas Data

Pada saat melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, peneliti sekaligus melakukan uji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan, peneliti mengacu pada pendapat Charles O. Jones dalam Arif Rohman (2012: 106) yang mendasarkan analisis implementasi pada konsepsi aktifitas-aktifitas fungsional, karena implementasi merupakan aktifitas untuk mengoperasikan sebuah program. Tiga pilar aktifitas Implementasi yaitu: (1)

Pengorganisasian merupakan aktifitas pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan, (2) Interpretasi merupakan aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan rutin yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Implementasi Pilar Pendidikan dalam Kebijakan Bangga Mbangun Desa di Kabupaten Cilacap didasarkan pada 3 aktifitas analisis yaitu: Pertama, Berdasarkan analisis pengorganisasian, seluruh program yang dibuat oleh Disdikpora Kabupaten Cilacap memiliki penanggungjawab serta pihak yang berperan sebagai implementor program. Hal tersebut sejalan dengan Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn dalam Arif Rohman (2012: 108) yang mengemukakan bahwa kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Mengacu pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Cilacap, Disdikpora Kabupaten Cilacap mengemban tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan program-program dari kebijakan bangga mbangun desa bidang pendidikan. Sehingga penanggungjawab seluruh program pilar pendidikan berasal dari Disdikpora. Selain penanggungjawab, implementor program pilar pendidikan berasal dari lembaga penyelenggara pendidikan serta *stakeholder* yang dipilih oleh Disdikpora. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan bahwa pemberian tanggungjawab tersebut sesuai dengan tupoksi lembaga tersebut.

Kedua, berdasarkan analisis interpretasi, respon sekolah terhadap segala program pilar pendidikan baik. Sekolah menerima dan melaksanakan program-program pemerintah daerah karena program-program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Respon guru baik, respon siswa terhadap program pilar pendidikan baik. Para siswa ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang dilakukan seperti dalam kegiatan-kegiatan *leader class*. Respon masyarakat terhadap

diterima serta dilaksanakan, (3) Aplikasi merupakan aktifitas yang berhubungan dengan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*), maka pendidikan keaksaraan. Sebagian lagi kurang

program-program pilar pendidikan bervariasi. Sebagian masyarakat menerima dan mendukung dengan cara ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang dilakukan seperti mengikuti menerima seperti kurang menyadari tentang pentingnya pendidikan anak usia dini.

Brian H. Hoogwood dan Lewis A. Gunn dalam Arif Rohman (2012: 108) berpendapat bahwa diperlukan komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Dalam implementasi pilar pendidikan, komunikasi antar implementor program kurang baik. Terlihat dalam program *leader class*, pihak pemerintah daerah dan sekolah kurang adanya komunikasi mengenai keberlanjutan program. Selain itu, pihak Disdikpora yang kurang mengetahui bentuk kerjasama seperti apa yang dilakukan oleh Bupati dalam meningkatkan akses perguruan tinggi. Kemudian, masyarakat kekurangan informasi mengenai bagaimana caranya melaporkan anak yang putus sekolah. Waktu yang digunakan untuk mengimplementasikan program pilar pendidikan sesuai target yang telah di tentukan dalam RPJMD, yang pada pelaksanaannya disesuaikan dengan keberlangsungan program tersebut. Seperti dalam pendidikan keaksaraan. PKBM memiliki jadwal sendiri dalam pembelajaran yang dilakukan sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga program yang diimplementasikan sesuai dengan tujuannya.

Ketiga, berdasarkan analisis aplikasi, pilar pendidikan dalam kebijakan bangga mbangun desa diimplementasikan melalui beberapa program diantara yaitu program unggulan dan 7 pilar pembangunan bidang pendidikan. Program unggulan yang dimaksud yaitu program *leader class* yang diimplementasikan oleh SMP Negeri 1 Cilacap pada jenjang SMP dan SMA Negeri 1 Cilacap pada jenjang SMA. Program *leader class* diaplikasikan dalam bentuk mengintegrasikan materi-materi kepemimpinan dalam setiap

pembelajaran dan sistem ketua kelas bergilir yang bertujuan melatih tanggungjawab siswa. Selanjutnya kegiatan rutin yang dilakukan yaitu apel pagi dan kesemestaan yang dilatih oleh Kodim 0703 Cilacap. Selain itu terdapat kegiatan penunjang di SMP Negeri 1 Cilacap yaitu diklat kepemimpinan dan bina iman. Sedangkan di SMA Negeri 1 Cilacap mengimplementasikan kegiatan *outbound*. Adapun kegiatan tambahan berupa pramuka sebagai *ekstrakurikuler* wajib bagi siswa *leader class* SMA Negeri 1 Cilacap dan pecinta alam sebagai *ekstrakurikuler* wajib siswa *leader class* SMP Negeri 1 Cilacap. selain program *leader class*, terdapat 7 pilar pembangunan bidang pendidikan yaitu tentang terlayannya PAUD, terwujudnya masyarakat yang melek aksara, terwujudnya wajib belajar 9 tahun, terwujudnya rintisan wajib belajar 12 tahun, peningkatan akses perguruan tinggi dan bursa kerja, tidak ada anak yang putus sekolah, dan pendidikan yang responsif gender.

Pilar terlayannya PAUD merupakan pilar yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini dengan cara melakukan sosialisasi PAUD holistik integratif dan program seribu PAUD. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Sedangkan program seribu PAUD bertujuan menambah jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Cilacap.

Pilar terwujudnya masyarakat melek aksara diaplikasikan dalam program pendidikan keaksaraan. Program ini bertujuan memberi layanan pendidikan kepada masyarakat yang masih buta aksara yang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: (1) penyisiran, kegiatan ini bertujuan mendata masyarakat yang masih buta aksara, (2) pendidikan, setelah memperoleh data masyarakat yang masih buta aksara, masyarakat tersebut melaksanakan kegiatan KBM di PKBM, dan (3) pendidikan lanjutan, kegiatan ini diperuntukan bagi masyarakat yang telah melek aksara agar memiliki keterampilan lain. Kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan pengkaryaan yang disesuaikan dengan profesi masyarakat.

Pilar terwujudnya wajib belajar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun bertujuan meningkatkan APK pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Pilar meningkatkan akses perguruan tinggi dan bursa kerja diimplementasikan dengan cara mendakan kerjasama dengan PTN/PTS dalam bentuk meminta tambahan kuota guna meningkatkan akses perguruan tinggi bagi masyarakat. Kemudian dengan adanya bursa kerja di sekolah guna meningkatkan akses bursa kerja. Pilar tidak ada anak putus sekolah bertujuan menurunkan APK putus sekolah yang dilakukan dalam kegiatan penyisiran. Kegiatan ini bertujuan mendata anak yang yang berpotensi dan telah putus sekolah. setelah mendapatkan data tersebut langkah selanjutnya yaitu mencari alternatif solusi. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan memanfaatkan dana BOS, CSR, serta beasiswa lain ataupun dengan cara mengikuti program paket kesetaraan A, B, dan C.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi Pilar Pendidikan dalam Kebijakan Bangga Mbangun Desa di Kabupaten Cilacap secara konsep masuk dalam kategori *structural approach* yang bersifat *top-down* karena penanggungjawab seluruh program pilar pendidikan berasal dari Disdikpora. Namun dalam mengimplementasikan program-program pilar pendidikan bersifat demokratis, karena melibatkan lembaga-lembaga lain.

Faktor pendukung implementasi pilar pendidikan yaitu adanya kolaborasi antar agen pelaksana dan sinergi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta dukungan sumber daya manusia yang memadai. Adapun faktor yang menghambat implementasi pilar pendidikan secara struktural yaitu dalam bentuk regulasi pendanaan yang relatif kecil serta komunikasi antar agen pelaksana yang kurang lancar.

Saran

1. Bagi Kepala Disdikpora

Melakukan koordinasi dengan SMP Negeri 1 Cilacap dan SMA Negeri 1 Cilacap terkait program *leader class* yang meliputi keberlangsungan dan pendanaan program. Koordinasi dilakukan dengan cara mengundang kepala sekolah guna mendiskusikan hal tersebut.

Melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala terkait PAUD dengan cara berkoordinasi dengan masing-masing kecamatan. Selain itu menambah kuota sosialisasi terkait pendidikan yang responsif gender dengan cara mengundang seluruh kepala sekolah yang dilakukan secara bergantian.

2. Bagi Kepala PBKM

Melakukan sosialisasi terkait prosedur melaporkan masyarakat yang masih buta aksara dan anak putus sekolah yang dilakukan dengan cara bersinergi dengan kegiatan-kegiatan PKK seperti dalam arisan.

3. Bagi Kepala sekolah

Melakukan koordinasi dengan guru untuk melakukan kegiatan yang responsif gender dengan cara mengintegrasikan materi gender pada pembelajaran dikelas.

4. Bagi Guru

Guru melakukan *sharing* dengan orangtua wali murid PAUD guna menyamakan persepsi mengenai pendidikan yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.

5. Bagi Masyarakat

Masyarakat berperan aktif dalam menanyakan hal-hal terkait pendidikan pada saat kegiatan-kegiatan arisan ataupun bersinergi dengan kegiatan lain yang memungkinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyakarta.
- . (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Badan Pusat Statistik. Diakses dari <http://jateng.bps.go.id> pada tanggal 23 Januari 2016, jam 09.00 WIB

H.A.R. Tilaar. (1992). *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Bandung: Rodakarya.

H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lexy J. Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Universitas Pendidikan Indonesia. 2015. Pendidikan Menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah. Diakses dari <http://berita.upi.edu/?p=4161> pada tanggal 15 Januari 2016, jam 20.00 WIB.